

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dunia usaha memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian ini tidak hanya didongkrak oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun dalam hal ini kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di daerah juga memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diperbarui terakhir kali pada 30 Januari 2014 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM meningkat dari 6,76% di tahun 2011 menjadi 9,90% di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM juga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya di daerah.

Tetapi dalam praktiknya, UMKMK masih kesulitan dalam mengakses sumber pemodal untuk pengembangan usaha. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah hadir sebagai salah satu upaya alternatif untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

daerah. PT Jamkrida Riau yang merupakan objek penelitian di dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah di Provinsi Riau. PT Jamkrida Riau bekerja sama dengan lembaga keuangan bank/non-bank dalam menjamin pemodalannya UMKMK untuk mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha.

Pendapatan usaha utama PT Jamkrida Riau yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan adalah berupa imbal jasa yang diberikan, yang disebut dengan pendapatan Imbalan Jasa Penjaminan (pendapatan IJP). Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa selain pendapatan IJP sebagai sumber penghasilan utama, pendapatan operasional lainnya berupa pendapatan investasi memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perusahaan. Ini dapat dilihat dari besarnya jumlah pendapatan yang berasal dari investasi pada laporan laba/rugi. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Jamkrida Riau selain mengandalkan kegiatan usaha penjaminan sebagai *core bussiness*, juga sangat mengandalkan pendapatan dari investasi.

Investasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 13 (2007) paragraf 03 adalah “suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.” Investasi merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dari aset tersebut diharapkan akan dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa penghasilan langsung seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan sebagainya, atau karena keuntungan berupa kenaikan atau apresiasi nilai investasi terkait maupun keuntungan penjualan sebagian atau keseluruhan investasi.

Pada dasarnya setiap tambahan penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak, dan dalam peraturan perpajakan tidak dibeda-bedakan perlakuan pendapatan investasi baik yang diperoleh perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD. Hal ini berarti pendapatan dari penyertaan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau tidak luput dari pengenaan pajak. Hal yang perlu dicermati adalah bagaimana perlakuan secara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan atas pendapatan investasi tersebut karena ada beberapa perbedaan.

Praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku umum di perusahaan, pada umumnya tidak dilakukan penjurnalan terkait dengan aspek-aspek perpajakan atas pendapatan investasi. Sebagai contoh misalnya investasi berupa saham. Pendapatan dari penyertaan investasi saham dapat berupa dividen yang bisa dikenakan pajak atau tidak, tergantung signifikansi kepemilikan saham oleh perusahaan investor. Apabila saham tersebut kemudian dijual dan mendapat keuntungan, akan dikenakan pajak dari nilai transaksi penjualan saham.

Secara akuntansi komersial umumnya pendapatan investasi dari dividen dan keuntungan penjualan saham tersebut dicatat bersih oleh perusahaan setelah dipotong pajak. Berbeda halnya dengan akuntansi perpajakan, pencatatan atas pendapatan investasi disajikan secara bruto dan kemudian dimunculkan akun terkait dengan aspek-aspek perpajakan sebagai faktor pengurang pendapatan. Perbedaan perlakuan pendapatan investasi dan pajak atas pendapatan investasi ini yang perlu dicermati bagaimana pengaruhnya secara perpajakan.

Uraian singkat mengenai contoh pendapatan dari investasi saham di atas adalah sebagian dari bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan

penjaminan. Lebih lanjut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan mengatur tentang jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan. Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut mengatur bahwa perusahaan penjaminan hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk: a. deposito pada bank; b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara; c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang telah memiliki izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan; e. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; f. reksa dana dan/atau reksa dana syariah; g. efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan/atau h. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa ada banyak opsi jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh PT Jamkrida Riau sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Ini merupakan suatu bahasan yang menarik, karena tiap-tiap pendapatan dari investasi tersebut berbeda-beda aspek perpajakannya. Karena itu, perlu dilakukan suatu tinjauan perpajakan atas pendapatan dari tiap-tiap investasi tersebut secara umum. Lebih lanjut, pembahasan akan difokuskan pada studi kasus tinjauan akuntansi perpajakan atas pendapatan investasi yang diperoleh PT Jamkrida Riau.

Berdasarkan uraian tersebut timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana aspek perpajakan atas pendapatan dari tiap-tiap investasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (secara umum)? Bagaimana aspek perpajakan atas pendapatan investasi PT Jamkrida Riau? Bagaimana perbedaan pencatatan atas

pendapatan investasi PT Jamkrida Riau secara akuntansi komersial yang dilakukan oleh perusahaan dengan akuntansi perpajakan? Bagaimana pelaporan aspek-aspek perpajakan atas pendapatan investasi tersebut di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan? Bagaimana hubungan aspek-aspek perpajakan tersebut dengan penghitungan laba/rugi menurut fiskal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menjadi latar belakang permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Lebih lanjut akan dilakukan pembahasan dengan merujuk pada undang-undang perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Daerah.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan atas investasi dan pendapatan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau pada laporan keuangan perusahaan.
2. Meninjau secara umum aspek-aspek perpajakan atas pendapatan dari jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) sebagai perusahaan penjaminan.
3. Mengetahui aspek perpajakan atas pendapatan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau.
4. Meninjau dan membandingkan bagaimana pencatatan atas transaksi dan pendapatan investasi secara akuntansi komersial yang dilakukan oleh PT

Jamkrida Riau dengan akuntansi perpajakan.

5. Meninjau bagaimana pelaporan atas pendapatan investasi PT Jamkrida Riau beserta aspek perpajakannya di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
6. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan investasi beserta aspek perpajakannya terhadap laba/rugi secara fiskal.
7. Memberikan saran dan masukan kepada PT Jamkrida Riau terkait dengan hasil penelitian.

C. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan di dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mengenai aspek-aspek perpajakan atas pendapatan investasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Kredit Daerah secara umum, dengan fokus studi kasus pada pendapatan investasi PT Jamkrida Riau. Pembatasan masalah difokuskan pada pendapatan investasi yang diperoleh PT Jamkrida Riau selama tahun 2015. Peninjauan atas pencatatan secara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dilakukan dengan memilih beberapa sampel atas transaksi pendapatan investasi selama tahun 2015.

D. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir guna mengumpulkan dan memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku

literatur, peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan OJK, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah, dan tulisan/publikasi ilmiah lainnya, guna memperoleh pemahaman yang kuat mengenai konsep dan landasan teori yang akan digunakan. Menurut Prof. Dr. Gorys Keraf (2001, 166), dalam penelitian kepustakaan terdapat tiga bahan bacaan yang diperlukan, yaitu:

Pertama, buku-buku atau bahan bacaan yang memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan digarap...*Kedua*, buku-buku yang harus dibaca secara mendalam dan cermat, karena bahan-bahan yang diperlukan...*Ketiga*, bahan bacaan tambahan yang menyediakan tambahan informasi untuk mengisi yang masih kurang untuk melengkapi karya tulis itu.

Dengan metode ini, teori-teori dan informasi yang relevan dari bahan-bahan bacaan yang telah dikumpulkan akan dipelajari dan dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori yang kuat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis maupun data elektronik dari objek penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan, fakta, dan keterangan-keterangan yang mendukung dalam penulisan karya tulis.

a. Observasi (Pengamatan)

Definisi dari Prof. Dr. Gorys Keraf (2001,162) adalah:

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

Metode ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi perusahaan dan melakukan studi atas berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas. Penulis mengumpulkan dokumen, laporan, dan catatan yang mendukung penulisan dan pembahasan karya tulis. Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman entitas yang memadai dan pemahaman atas permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Irawan Soehartono (2002,67) mendefinisikan “Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.” Metode ini digunakan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak PT Jamkrida Riau di bagian Divisi Keuangan dan Investasi, guna memperoleh penjelasan rinci terkait permasalahan yang dibahas.

E. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini dibagi menjadi beberapa bab dan subbab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang karya tulis ini antara lain mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan yang merupakan batasan permasalahan yang akan dibahas, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II DATA DAN FAKTA

Pada BAB II akan diuraikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang dibahas dalam karya tulis ini, meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, kegiatan usaha perusahaan, gambaran umum

administrasi perpajakan perusahaan, kebijakan akuntansi atas investasi perusahaan, penyajian dan pengungkapan atas investasi perusahaan, data mengenai bentuk-bentuk investasi perusahaan, dan data-data terkait dengan investasi di dalam CaLK.

BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III akan diuraikan teori-teori yang menjadi landasan pembahasan dalam meninjau data-data terkait dengan transaksi dan pendapatan investasi. Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, akan dilakukan pembahasan mengenai aspek perpajakan pendapatan investasi perusahaan penjaminan (dalam hal ini Lembaga Penjaminan Kredit Daerah secara umum), tinjauan terhadap aspek-aspek perpajakan dari transaksi dan pendapatan investasi yang dilakukan oleh PT Jamkrida Riau, tinjauan atas pencatatan menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, serta tinjauan atas pelaporan aspek-aspek perpajakan terkait dengan pendapatan investasi di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan serta pengaruhnya terhadap laba/rugi fiskal.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB IV akan ditarik beberapa simpulan berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan pada BAB II dalam kaitannya dengan landasan teori dan pembahasan pada BAB III. Berdasarkan uraian dari simpulan tersebut akan diberikan saran-saran perbaikan berupa masukan yang berguna bagi PT Jamkrida Riau.